

## Implementasi Ekonomi Biru dalam Mendukung Pencapaian SDG 14 di Indonesia

*(Implementation of the Blue Economy in Supporting the Achievement of SDG 14 in Indonesia)*

Vira Sabila<sup>\*)</sup>, Auriza Ziane Nugraha, Mozza Haura Azani, Salwa Sabryanti dan Ma'ruf

Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia  
<sup>\*)</sup>corresponding e-mail: virasabila12@upi.edu

### ABSTRACT

The implementation of the blue economy is a strategic approach to support the sustainability of marine and coastal resources, aligning with Indonesia's Sustainable Development Goal (SDG) 14, which aims to protect marine and coastal ecosystems. As an archipelagic nation with rich marine biodiversity, Indonesia faces challenges in sustainably utilizing its marine resources. This study aims to analyze the implementation of the blue economy in Indonesia to support the achievement of SDG 14 through a literature review. The research method involves a literature analysis covering policies, programs, and best practices in the blue economy across various regions in Indonesia. The findings indicate that Indonesia's blue economy initiatives include sustainable fisheries management, marine ecosystem conservation, and renewable energy development from the sea. However, challenges remain in terms of stakeholder coordination, funding, and public understanding of the blue economy. This study recommends enhancing coordination, public education, and stronger policy support to accelerate blue economy implementation in Indonesia, thereby significantly contributing to SDG 14 achievement.

**Keywords:** Blue economy, SDG 14, Indonesia, Ocean Sustainability, Policy.

### ABSTRAK

Implementasi ekonomi biru merupakan pendekatan strategis untuk mendukung keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir, yang selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 14 di Indonesia, yaitu menjaga ekosistem laut dan pesisir. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, menghadapi tantangan dalam pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ekonomi biru di Indonesia dalam mendukung pencapaian SDG 14 melalui tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah analisis literatur yang mencakup studi kebijakan, program, dan praktik terbaik ekonomi biru di berbagai wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia meliputi beberapa inisiatif, seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan, konservasi ekosistem laut, dan pengembangan energi terbarukan dari laut. Namun, masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar pemangku kepentingan, pendanaan, dan pemahaman masyarakat terkait ekonomi biru. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, edukasi publik, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk mempercepat implementasi ekonomi biru di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian SDG 14.

**Kata kunci:** Ekonomi biru, SDG 14, Indonesia, Keberlanjutan Laut, Kebijakan.

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah, dengan wilayah laut yang mencapai sekitar 3,25 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 kilometer. Sumber daya laut Indonesia tidak hanya mendukung keberlanjutan ekologi tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi jutaan masyarakat pesisir (KKP, 2022). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melestarikan ekosistem laut. Menurut (Maulani, Tsani, Tinambunan, & Mauluddin, 2022) “Ekonomi biru merupakan salah satu pembangunan yang satu konsep dari mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan utamanya adalah sumber daya laut”. Oleh karena itu, konsep ekonomi biru menjadi sangat relevan bagi Indonesia dalam mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14, yang menargetkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari laut, lautan, dan sumber daya kelautan (UN, 2015).

SDG 14 bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan laut yang mendesak, seperti polusi laut, penurunan keanekaragaman hayati, degradasi habitat, dan overfishing. Masalah-masalah ini juga menjadi tantangan signifikan di Indonesia, yang dilaporkan sebagai salah satu kontributor terbesar polusi sampah plastik laut di dunia. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, di mana sebagian besar berakhir di laut (KLHK, 2021). Selain itu, penangkapan ikan yang tidak terkendali serta kerusakan terumbu karang akibat aktivitas destruktif turut mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Dalam konteks ini, ekonomi biru menjadi pendekatan strategis yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestariannya, sehingga relevan untuk mendukung target-target SDG 14.

Ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan tetap melindungi ekosistemnya. Menurut World Bank (2017), ekonomi biru mencakup kegiatan seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis ekowisata, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah laut. Melalui ekonomi biru, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologi. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mendukung ketahanan

pangan, serta mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut. Selain itu, ekonomi biru juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor yang ramah lingkungan dan meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto (Sukandi et al., 2020).

Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya ancaman yang dihadapi ekosistem laut Indonesia, sementara manfaat ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan laut belum sepenuhnya terwujud. Meskipun berbagai kebijakan telah dirumuskan, seperti perluasan kawasan konservasi laut dan kebijakan pengelolaan sampah plastik, implementasi ekonomi biru di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pendanaan untuk program konservasi laut, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan ekosistem laut. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, keberlanjutan sumber daya laut Indonesia berpotensi terganggu, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target SDG 14.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan (*novelty*) dalam konteks pendekatan holistik yang menganalisis implementasi ekonomi biru di Indonesia secara terintegrasi dengan target SDG 14. Banyak penelitian sebelumnya yang membahas ekonomi biru dan SDG 14 secara terpisah, namun studi yang menganalisis keterkaitan langsung antara keduanya dalam konteks kebijakan dan tantangan yang dihadapi Indonesia masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi celah literatur tersebut dengan mengidentifikasi bentuk implementasi ekonomi biru yang telah dijalankan, menilai dampaknya terhadap target SDG 14, serta mengeksplorasi tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang efektivitas ekonomi biru dalam mendukung keberlanjutan sumber daya laut dan memberikan rekomendasi yang konkret bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi ekonomi biru di Indonesia dalam konteks pencapaian target SDG 14.
2. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penerapan ekonomi biru terhadap pelestarian sumber daya laut di Indonesia.
3. Menggali tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan ekonomi biru di Indonesia.

4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi ekonomi biru agar dapat lebih optimal mendukung pencapaian SDG 14 di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan dan program ekonomi biru yang dilaksanakan di Indonesia, dengan penekanan pada wilayah pesisir dan laut, khususnya di kawasan-kawasan yang menjadi pusat konservasi laut. Wilayah-wilayah yang dipilih merupakan contoh signifikan dari implementasi ekonomi biru dan keberhasilannya dalam mendukung pencapaian SDG 14.

#### **Bahan dan Alat**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber sekunder yang mencakup:

1. Dokumen Resmi: Kebijakan pemerintah terkait ekonomi biru dan SDG 14, seperti Rencana Aksi Nasional, dokumen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
2. Artikel Jurnal: Studi-studi akademis yang membahas implementasi ekonomi biru, dampaknya terhadap ekosistem laut, dan evaluasi kebijakan, diambil dari jurnal terindeks nasional dan internasional.
3. Laporan Penelitian: Laporan dari organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan riset terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.
4. Data Statistik: Data sekunder yang diperoleh dari BPS dan organisasi terkait mengenai kondisi kelautan, stok ikan, dan dampak kebijakan ekonomi biru.

#### **Desain dan Prosedur Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis literatur (literature review). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meneliti secara mendalam berbagai sumber literatur yang relevan, mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara kebijakan ekonomi biru dan pencapaian SDG 14. Prosedur penelitian meliputi:

1. Identifikasi Sumber: Mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen dan publikasi yang relevan dari berbagai sumber.
2. Kategorisasi: Mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan ekonomi biru, pelestarian ekosistem, tantangan kebijakan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. Analisis Tematik: Menganalisis setiap literatur dengan mengidentifikasi tema dan sub-tema yang muncul, serta membandingkan dan menyandingkan temuan dari berbagai sumber.

### Metode Pengumpulan Data

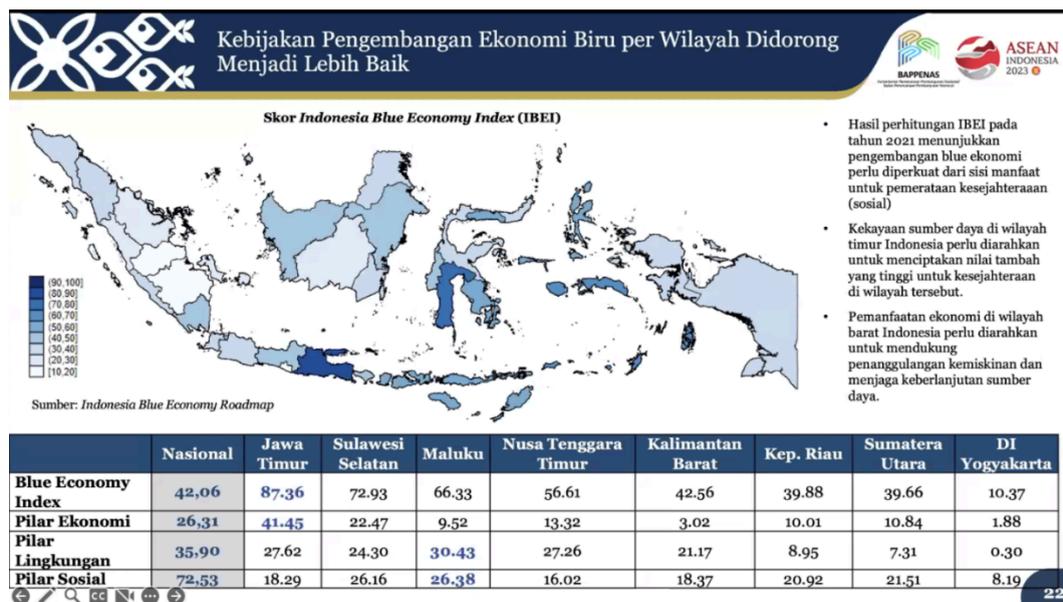
Data dikumpulkan melalui beberapa tahap:

1. Pengumpulan Dokumen Kebijakan: Mengakses dokumen resmi yang relevan, termasuk kebijakan dari KKP dan KLHK, melalui situs web resmi dan publikasi pemerintah.
2. Literatur dari Jurnal dan Laporan: Melakukan pencarian di basis data akademik seperti Google Scholar dan Scopus untuk mendapatkan artikel yang berkaitan dengan implementasi ekonomi biru dan SDG 14.
3. Data Statistik: Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi kelautan dan perikanan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan tahunan dari KKP.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui langkah-langkah berikut:

1. Analisis Konten: Menganalisis konten dari dokumen dan artikel yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kebijakan utama, strategi, dan dampak ekonomi biru terhadap SDG 14.
2. Sintesis Data: Mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur untuk merumuskan gambaran menyeluruh tentang penerapan ekonomi biru di Indonesia.
3. Komparasi: Membandingkan hasil analisis dengan studi-studi lain yang relevan untuk menilai konsistensi dan perbedaan temuan dalam konteks yang lebih luas.



Gambar 1. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Biru per Wilayah  
Sumber: [www.fkpindonesia.org](http://www.fkpindonesia.org)

Untuk mendukung analisis, peta yang menunjukkan lokasi kebijakan ekonomi biru yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Raja Ampat dan Laut Sawu, dapat digunakan. Peta ini menunjukkan koordinat dari masing-masing kawasan yang telah menjadi fokus implementasi ekonomi biru.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi ekonomi biru dalam konteks pencapaian SDG 14 di Indonesia melalui pendekatan analisis literatur yang mendalam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan praktik ekonomi biru serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis literatur, implementasi ekonomi biru di Indonesia dalam mendukung SDG 14 telah dilakukan melalui beberapa inisiatif kebijakan dan program yang berfokus pada perlindungan ekosistem laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pengurangan polusi laut. Berikut adalah hasil penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian:

#### 1. Implementasi Ekonomi Biru dalam Mendukung SDG 14 di Indonesia

Indonesia telah menerapkan ekonomi biru melalui kebijakan seperti penetapan kawasan konservasi laut, larangan penggunaan alat tangkap destruktif, dan pengelolaan sampah plastik di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan target untuk mengonservasi 10% wilayah laut nasional pada tahun 2030, dan pada 2022, kawasan konservasi laut telah mencapai 23 juta hektar atau sekitar 7,3% dari luas laut Indonesia (KKP, 2022). Selain itu, pelarangan alat tangkap destruktif, seperti penggunaan bom dan sianida, bertujuan untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut.

#### 2. Dampak Implementasi Ekonomi Biru terhadap Pelestarian Sumber Daya Laut

Penerapan kebijakan ekonomi biru berdampak positif pada pelestarian ekosistem laut dan meningkatkan populasi ikan di kawasan konservasi. Data menunjukkan bahwa kawasan konservasi laut telah menjadi tempat perlindungan bagi spesies laut yang terancam, dan pemulihan habitat laut, seperti terumbu karang dan padang lamun, terus berlangsung. Menurut Tarigan et al. (2019), kawasan perlindungan laut yang dikelola dengan baik dapat

meningkatkan biomassa ikan hingga 600% dibandingkan dengan kawasan yang tidak dilindungi, yang mendukung keberlanjutan perikanan.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Biru

Tantangan dalam penerapan ekonomi biru mencakup keterbatasan dana, rendahnya koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Menurut Bappenas (2021), meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk program konservasi laut, pendanaan ini masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan seluruh kawasan pesisir yang luas. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat, terutama di wilayah pesisir, turut menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dan praktik perikanan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### 1. Implementasi Ekonomi Biru dan SDG 14

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia telah berjalan dengan upaya konservasi laut melalui kawasan perlindungan laut dan kebijakan pengelolaan perikanan. Menurut Tarigan dan Simbolon (2019), kawasan perlindungan laut efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menyediakan perlindungan ekosistem yang penting bagi kelestarian jangka panjang. Di beberapa wilayah konservasi laut di Indonesia, seperti di Raja Ampat, keanekaragaman spesies laut dan terumbu karang yang sehat telah berkontribusi pada peningkatan potensi ekowisata dan peluang ekonomi lokal (Tarigan et al., 2019). Namun, efektivitas kawasan perlindungan ini tergantung pada penegakan hukum dan pemantauan rutin yang masih menjadi tantangan besar.

### 2. Dampak Ekonomi Biru terhadap Pelestarian Ekosistem Laut

Dampak positif kebijakan ekonomi biru terlihat dalam peningkatan biomassa ikan dan pemulihan ekosistem laut di kawasan konservasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukandi et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kawasan konservasi laut berfungsi sebagai “bank keanekaragaman hayati” yang mendukung keberlanjutan stok ikan. Hasil ini konsisten dengan studi di negara lain, seperti pada penelitian oleh World Bank (2017) di kawasan Karibia, di mana kawasan konservasi laut berkontribusi terhadap ketahanan pangan dengan melindungi stok ikan. Meskipun dampak positif ini terlihat, polusi laut, terutama sampah plastik, masih menjadi ancaman signifikan. Data dari KLHK (2021) menunjukkan bahwa sekitar 70% sampah plastik di laut Indonesia berasal dari daratan, yang memerlukan penanganan serius pada tingkat kebijakan lintas sektor.

### 3. Tantangan dan Rekomendasi dalam Implementasi Ekonomi Biru

Tantangan utama dalam penerapan ekonomi biru di Indonesia mencakup keterbatasan dana, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Keterbatasan pendanaan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi secara efektif. Tarigan et al. (2019) mengungkapkan bahwa alokasi dana yang memadai sangat penting untuk keberhasilan program konservasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya melalui kerja sama internasional dan partisipasi sektor swasta. Selain itu, rendahnya koordinasi antar lembaga terkait masih menjadi kendala dalam pengelolaan ekonomi biru. Menurut Sukandi et al. (2020), diperlukan badan koordinasi khusus yang dapat menyatukan visi dan kebijakan ekonomi biru dari tingkat pusat hingga daerah.

Beberapa literatur mengidentifikasi tantangan yang signifikan dalam penerapan ekonomi biru, termasuk:

#### 1. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi

Banyak wilayah pesisir belum memiliki infrastruktur yang mendukung, seperti pelabuhan modern dan fasilitas pengolahan sampah. Grafik berikut menunjukkan distribusi infrastruktur pelabuhan yang ada di wilayah pesisir Indonesia.

#### 2. Keterbatasan Regulasi dan Penegakan Hukum

Kebijakan terkait pengelolaan laut di Indonesia sering kali terbatas pada level peraturan tanpa implementasi yang efektif. Kajian literatur menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menyebabkan praktik penangkapan ikan ilegal masih terjadi di berbagai wilayah.

#### 3. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim, seperti kenaikan suhu laut dan acidifikasi, semakin mengancam ekosistem laut Indonesia. Tabel di bawah ini merangkum dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut Indonesia berdasarkan kajian literatur.

**Tabel 1 Dampak Perubahan Iklim**

Dampak Perubahan Iklim	Ekosistem yang Terpengaruh	Contoh Kasus di Indonesia
Kenaikan Suhu Laut	Terumbu karang	Pemutihan karang di Kepulauan Seribu
Acidifikasi Laut	Spesies ikan tertentu	Penurunan populasi ikan di Laut Banda
Kenaikan Permukaan Laut	Ekosistem mangrove	Erosi pantai di Pantai Utara Jawa

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi ekonomi biru mencakup peningkatan pendanaan, perbaikan koordinasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat pesisir

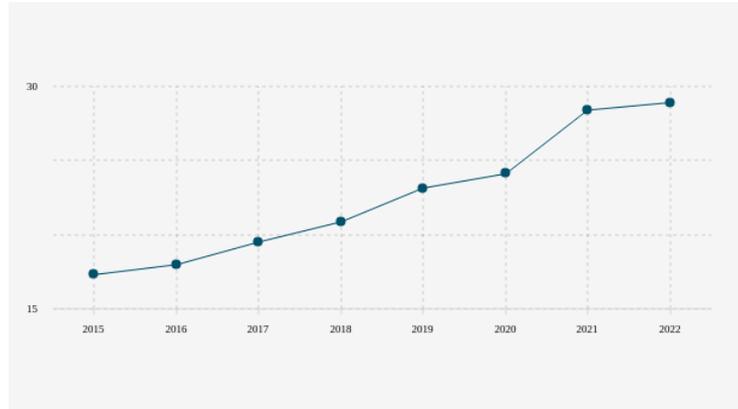
mengenai pentingnya pelestarian laut. Pemerintah dapat mempertimbangkan penggalangan dana melalui skema public-private partnership atau memanfaatkan dukungan internasional dari organisasi seperti World Bank dan UNDP untuk mendukung konservasi laut. Di samping itu, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan dan kampanye lingkungan yang menekankan pentingnya ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (Sukandi et al., 2020).

Di bawah ini menunjukkan beberapa kebijakan ekonomi biru yang telah diterapkan di Indonesia beserta dampaknya terhadap pelestarian ekosistem laut:

**Tabel 2 Kebijakan Ekonomi Biru**

Kebijakan Ekonomi Biru	Dampak Utama
Penetapan Kawasan Konservasi	Meningkatkan keanekaragaman hayati laut
Larangan Alat Tangkap Destruktif	Melindungi terumbu karang dan populasi ikan
Pengelolaan Sampah Plastik	Mengurangi polusi laut, meningkatkan kualitas ekosistem

Gambar 2 di bawah ini memperlihatkan luas kawasan konservasi laut yang telah dicapai Indonesia pada tahun 2022, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 2 Luas Kawasan Konservasi Laut

Sumber: [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa ekonomi biru di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi pencapaian SDG 14, meskipun tantangan dalam hal pendanaan, koordinasi, dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi agar implementasi ekonomi biru dapat berjalan optimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak dan peningkatan kapasitas lokal adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas program ekonomi biru.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)14 yang berfokus pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ekonomi biru, yang mencakup upaya konservasi, pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengurangan polusi laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Beberapa hasil penting dari penelitian ini mencakup:

### 1. Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia dan Pencapaian SDG 14

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi biru dalam kebijakan nasional, seperti penetapan kawasan konservasi laut, pelarangan praktik perikanan destruktif, dan inisiatif pengelolaan sampah plastik. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam mendukung target SDG 14. Namun, efektivitas implementasi ini masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemantauan berkelanjutan.

### 2. Dampak Positif dan Negatif Implementasi Ekonomi Biru

Penerapan kuota perikanan, telah membantu menjaga populasi ikan yang berkelanjutan, sementara program konservasi terumbu karang dan mangrove telah memberikan manfaat ekologis yang penting. Di sisi lain, dampak negatif muncul ketika keterbatasan dana atau kapasitas menyebabkan ketidakmerataan implementasi di berbagai wilayah. Masalah lainnya termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan industri mengenai pengelolaan limbah yang berkelanjutan, yang mengakibatkan masih tingginya tingkat polusi laut di beberapa wilayah.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Biru

Tantangan utama dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia meliputi keterbatasan pendanaan, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya partisipasi Masyarakat. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kebijakan ekonomi biru sering kali tidak diimplementasikan secara optimal di berbagai tingkatan administrasi.

### 4. Rekomendasi untuk Penguatan Implementasi Ekonomi Biru

Pemerintah perlu meningkatkan pendanaan, baik melalui alokasi anggaran nasional yang lebih besar, kerja sama internasional, atau melalui kemitraan dengan sektor swasta.

Perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan badan khusus yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi biru dari pemerintah pusat hingga tingkat lokal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi biru perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan konservasi. Hal ini akan mendukung terciptanya kolaborasi yang lebih luas dan memastikan bahwa ekonomi biru tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga sebuah praktik yang dilakukan oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi biru di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDG 14. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat koordinasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mendukung pelestarian ekosistem laut, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, stabilitas ketahanan pangan, dan ketahanan lingkungan di masa depan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan paper ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, teman, dan rekan sejawat yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang tak ternilai selama proses penulisan.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah menyediakan sumber literatur yang menjadi dasar penelitian ini, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, dan organisasi internasional yang berkontribusi dalam menyediakan data dan laporan terkait implementasi ekonomi biru dan upaya pencapaian SDG 14 di Indonesia. Data dan literatur yang tersedia menjadi sumber penting dalam penulisan dan analisis paper ini.

Selain itu, penulis berterima kasih kepada pihak akademis dan para peneliti yang telah menghasilkan berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang mendasari penulisan paper ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam mengimplementasikan ekonomi biru untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Terakhir, segala masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian ini ke depannya. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, penyusunan paper ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., Tarsat, M., Supriatna, E., & Ma'ruf. (2023). CONSERVATION AND SUSTAINABILITY OF TURTLE FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCE IN BAKUNGAN KECIL ISLAND, SANDAKAN, SABAH, MALAYSIA. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 4(2), 99-106.
- Almaududi, S. (2024). BLUE ECONOMY DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7, 5.
- Apriliani, M. E. (2023). Implementasi Konsep Blue Economy di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 14: Life Below Water. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, 7, 79-87.
- Bakti, S., & Hakim, L. N. (2023). Ekonomi Biru dan Kepemimpinan Strategis: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Kalianda Halok Gagas*, 7, 18.
- Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. (2023). *Perspektif Hukum*, 23(106-126), 21.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1), 106-128.
- Ma'ruf, M., Eryawan, B. S., Sutarjo, A., Supriatna, E., Wardana, D., & Luthfy Rachman. (2024). Penerapan Sistem Rantai Dingin Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Produksi Jamur Merang. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(3), 851-862.
- Maulani, S. F., Tsani, R. R., Tinambunan, R. C., & Mauluddin, F. M. (2022). TREN PENELITIAN STUDI EKONOMI BIRU: TINJAUAN SISTEMATIS SATU DEKADE. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11, 10.
- Tsani, R., Ma'ruf, Ahmad, K. K., & Zuhariyah, P. S. (2022). UPAYA PELESTARIAN EKOSISTEM PESISIR MELALUI PENYULUHAN DAN PRAKTEK

PENGOLAHAN BUAH MANGROVE DI DESA LONTAR, BANTEN. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 100-108.

Pristiandaru, Danur Lambang. 2023. *Program Ekonomi Biru Disebut Sejalan dengan SDGs*, <https://lestari.kompas.com/read/2023/08/30/120000486/program-ekonomi-biru-disebut-sejalan-dengan-sdgs>, diakses 5 November 2024.